



---

---

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI  
UMUM TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH PADA  
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR**

**Dwi Wahyu Setyowati**  
**Program Studi Pendidikan Akuntansi – FPIPS**  
**IKIP PGRI MADIUN**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan tehnik analisis data asumsi klasik, regresi linier berganda dan uji hipotesis yang diolah dalam SPSS (*Statistical Package for the Social Science*) for windows versi 16.0.

Hasil Analisis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan DAU mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah. Jika dilihat lebih lanjut, tingkat ketergantungan alokasi belanja daerah lebih dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah daripada DAU. Berdasarkan uji t dengan perhitungan SPSS for windows versi 16.0 dapat disimpulkan bahwa diantara variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap alokasi belanja daerah Provinsi Jawa Timur adalah variabel pendapatan asli daerah. Karena nilai  $t_{hitung}$  variabel pendapatan asli daerah lebih besar dari pada  $t_{hitung}$  variabel dana alokasi umum yaitu  $2,845 > 1,332$  maka keputusan  $H_0$  ditolak, artinya pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap alokasi belanja daerah di Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Daerah.

**I. PENDAHULUAN**

Dalam era globalisasi reformasi dan tuntutan transparansi yang semakin meningkat, peran akuntansi semakin dibutuhkan. Tidak hanya untuk kebutuhan pihak manajemen suatu entitas, tetapi juga untuk kebutuhan pertanggungjawaban kepada banyak pihak yang memerlukan. Untuk itu, tuntutan penyediaan informasi termasuk informasi keuangan dan akuntansi semakin dibutuhkan.

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode (PP No. 24 Tahun 2005)

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan



**THE 4<sup>th</sup> FIPA ( Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi )**  
**IKIP PGRI MADIUN**  
**13 September 2014, ISSN : 1337-9723**

---

---

DPRD yang kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah (PERDA). Dengan demikian APBD kabupaten / kota berarti rencana keuangan seperti dimaksud yang disetujui bersama antara Bupati/ Walikota dengan DPRD Kabupaten / Kota. Struktur APBD kabupaten/ kota merupakan kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

. APBD juga diartikan sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP No.24 Tahun 2005). Sedangkan menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyerahan berbagai kewenangan dari Pemerintah ke Pemda disertai dengan penyerahan dan pengalihan masalah pembiayaan. Sumber pembiayaan yang penting bagi Pemda adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang komponennya adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD dalam jumlah yang besar diharapkan dapat mendorong akuntabilitas yang lebih, memperbaiki pembiayaan daerah, dan juga dapat memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari transfer Pemerintah pusat yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah.

Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping Dana Perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan daerah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan Dana Alokasi Umum terletak pada



kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (Undang-undang No.33 Tahun 2004).

Anggaran belanja daerah didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Dalam penjelasan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004, salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah luas wilayah. Daerah dengan wilayah yang lebih luas tentu membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas.

DAU dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-Undang (UU No.32 Tahun 2004).

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Warsito, dkk (2008) mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

## **II. TELAAH LITERATUR**

### **A. Anggaran Daerah**

Anggaran merupakan satu instrumen penting di dalam manajemen karena merupakan bagian dari fungsi manajemen. Di dunia bisnis maupun di organisasi sektor publik, termasuk pemerintah, anggaran merupakan bagian dari aktivitas penting yang dilakukan secara rutin. Bahkan, di akuntansi pemerintahan dibuat pencatatan anggaran, mengingat anggaran adalah bagian penting dalam aktivitas pemerintahan (Bahtiar dkk, 2002)..



Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode (PP No. 24 Tahun 2005).

Menurut PP No.24 Tahun 2005 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan (Kep. Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002).

Fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:

- 1) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
- 2) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
- 3) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
- 4) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.
- 5) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik (Darise Nurlan, 2008: 133).

## **B. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri:

- a. Pajak Daerah,
- b. Retribusi Daerah,
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 1, "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.



### **C. Dana Alokasi Umum**

Dana alokasi umum dibagikan kepada daerah berasal dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan nilainya minimum 25% dari anggaran rutin dalam APBN. Dana ini dialokasikan 10% untuk propinsi dan 90% untuk kabupaten/kota (Suparmoko, 2002: 42).

Fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya daerah yang poetensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar (Darise Nurlan, 2008: 137

### **D. Alokasi Belanja Daerah**

Menurut Nunuy Nur Afifah (2009: 15) belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Menurut Halim (2004: 100) belanja daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang di dasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ini meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer. Klasifikasi kedua adalah menurut organisasi, yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Sementara itu, klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## **III. METODELOGI PENELITIAN**

### **A. Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Jenis Data**

Data kuantitatif yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2007-2008

#### **2. Sumber Data**

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang diperoleh dari Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet. Dari laporan Realisasi APBD diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum pada tahun 2007-2008.

### **B. Tehnik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara metode dokumentasi. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-



data yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode sensus dengan mengambil sebagian populasi yaitu sebanyak 20 Kabupaten/Kota di Jawa Timur

### C. Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis data merupakan cara yang utama digunakan untuk mengolah data yang terkumpul sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS (*Statistical Package for the Social Science*) for windows versi 16.0.

- a. Uji Instrumen.
  - a. Uji Normalitas
  - b. Uji Asumsi Klasik
    1. Uji Multikolinearitas
    2. Uji Heteroskedastisitas
    3. Uji Autokorelasi
  - c. Analisis Linear Berganda

Rumus regresi linear berganda (Duwi Priyatno, 2010:82) adalah:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

Dimana:

|    |                         |
|----|-------------------------|
| Y  | =Alokasi belanja daerah |
| X1 | =Pendapatan asli daerah |
| X2 | =Dana alokasi umum      |
| a  | =Bilangan konstanta     |
| b  | =Koefisien regresi      |

- d. Uji Hipotesis  
Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai t dan nilai F.

## IV. HASIL PEMBAHASAN

### Analisis Linier Berganda

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Teknik analisa ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap alokasi belanja daerah. Dalam penelitian ini, hasil regresi menggunakan *unstandardized coefficients*. Persamaan linier dari hasil regresi yang didapat adalah  $Y = 2.049.000.000.000.000 + 0.605 X_1 - 0.284 X_2$

Pada persamaan regresi tersebut, koefisien regresi pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap alokasi beanja daerah dan koefisien dana alokas umum tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah. Dari hasil koefisien regresi yang didapat menunjukkan, faktor pendapatan asli daerah ( $x_1 = 0,605$ ) menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi alokasi belanja daerah, kemudian untuk dana alokasi umum ( $x_2 = -0,284$ ) tidak mempengaruhi alokasi belanja daerah.



### **Pengujian Hipotesis**

Uji – t ini digunakan untuk membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap alokasi belanja daerah. Pengujian hipotesis secara parsial dari variabel independen yang meliputi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi belanja daerah. pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah (uji-t = 2,845 dengan sig. 0,07 ), dana alokasi umum tidak berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah dengan (uji-t= -1,332).

### **Pengujian secara Silmutan (Uji F)**

Dari hasil pengujian diperoleh nilai F sebesar 4,595, dengan nilai signifikansi sebesar  $0,016 < 0,05$  maka hipotesis diterima yaitu pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah.

### **Pembahasan**

#### 1. Pendapatan asli daerah

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah. Hasil ini sesuai dengan hipotesis 1, bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Penelitian ini dibuktikan dengan menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 2,845 dengan signifikansi sebesar 0,007.

#### 2. Dana alokasi umum

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis 2, bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. DAU tidak berpengaruh karena kebutuhan sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional. Pemerintah Daerah hanya memberikan program-program yang harus dicapai seperti pada bidang kegiatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Sifat DAU secara penggunaan tergantung dari Pusat bukan Daerah, sehingga DAU tidak mempengaruhi alokasi belanja daerah secara signifikan.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian di Provinsi Jawa Timur diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Daerah. Karena pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh asli dari daerah itu sendiri. Sehingga semakin tinggi nilai Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan maka semakin tinggi juga nilai Belanja Daerah yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.



**THE 4<sup>th</sup> FIPA ( Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi )**  
**IKIP PGRI MADIUN**  
**13 September 2014, ISSN : 1337-9723**

---

---

Sebaliknya jika nilai Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan rendah maka nilai Belanja Daerah yang dikeluarkan juga rendah.

2. Berdasarkan hasil penelitian di Provinsi Jawa Timur diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Daerah. Karena kebutuhan sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional. Sehingga berapapun nilai Dana Alokasi Umum yang diterima maka tidak berpengaruh terhadap nilai Belanja Daerah.
3. Berdasarkan hasil penelitian di Provinsi Jawa Timur diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersamaan berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Daerah. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa jika variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum ditingkatkan, maka akan diikuti dengan meningkatnya alokasi belanja daerah dan sebaliknya jika variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum menurun, maka akan diikuti dengan menurunnya alokasi belanja daerah.

#### **Saran**

Untuk meningkatkan Alokasi Belanja Daerah maka Pemerintah Provinsi diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan memanfaatkan daerah yang memiliki potensi wisata dengan memberikan fasilitas sehingga daerah tersebut bisa berkembang, serta memberikan pajak dan retribusi pada tempat-tempat tertentu sebagai upaya untuk menambahkan nilai pendapatan asli daerah. Demikian juga Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar terus mengupayakan untuk bisa menarik Dana Alokasi Umum sebesar mungkin, dengan memaksimalkan kriteria pengalokasian DAU yaitu kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sehingga Pemerintah Pusat bisa memberikan peluang untuk jumlah nilai DAU yang dikeluarkan agar dapat memenuhi sarana dan prasarana masyarakat Provinsi Jawa Timur serta terciptanya kesejahteraan masyarakat yang aman dan nyaman

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bahtiar, Dkk. 2002. *Akuntansi pemerintahan*. Penerbit. Salemba 4: Jakarta
- Darise Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah : Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit. Indeks : Jakarta
- Duwi, Priyatno. 2010. *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi*. Salemba 4 : Jakarta
- Kusnandar dan Dodik Siswanto. 2011. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*. Jurnal Akuntansi (Online), (<http://www.search-document.com/pdf/2/8/JUDUL-skripsi-akuntansi-untuk-pemerintah-kabupaten.html>), Diunduh 09 Desember 2012.



**THE 4<sup>th</sup> FIPA ( Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi )**  
**IKIP PGRI MADIUN**  
**13 September 2014, ISSN : 1337-9723**

---

---

- Nordiawan , Dkk. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit. Salemba 4: Jakarta
- Prakosa, Kesit. 2004. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY)*. Jurnal Akuntansi (Online), (<http://www.search-document.com/pdf/1/1/pengaruh-pendapatan-asli-daerah.html>, Diunduh 19 Maret 2012).
- Putro, Nugroho. 2009. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Study Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)*. Jurnal Akuntansi (Online), (<http://www.search-document.com/pdf/3/7/pengaruh-pendapatan-asli-daerah.html>, Diunduh 09 Desember 2012)
- Nur Indah. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)*. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro : Semarang. (Online),(<http://www.search-document.com/pdf/2/8/JUDUL-skripsi-akuntansi-untuk-pemerintah-kabupaten.html>, Diunduh 19 Maret 2012
- Situngkir, Anggiat. 2009. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara*. Tesis Pascasarjana (dipublikasikan). Universitas Sumatera Utara : Medan. (Online), (<http://www.search-document.com/pdf/3/7/pengaruh-pendapatan-asli-daerah.html>, Diunduh 19 Maret 2012
- Sugiono. 2010. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik (untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah)*. Penerbit Andi: Yogyakarta
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29/2002 tentang *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerahserta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD*
- Realisasi APBD Tahun 2007-2008 Total Se-provinsi Jawa Timur dalam: [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)